

INTISARI

Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang memiliki predikat Kota Layak Anak (KLA). Predikat KLA ini merupakan komitmen suatu kota dengan mengutamakan sistem pembangunan dalam mengintegrasikan berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk turut serta membangun komitmen terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Akan tetapi, di balik predikat KLA yang didapatkan Kota Surakarta ini masih terdapat permasalahan khususnya mengenai hak dasar kesehatan anak. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan *stunting* dengan menggunakan analisis peran stakeholder serta kendala apa saja yang terjadi dalam upaya penanganan *stunting*. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kolaborasi antar *stakeholder* dalam upaya penanganan *stunting*, seperti yang diamanatkan pada konsep KLA. Hubungan kolaborasi ini dapat dilihat pada terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surakarta yang terdiri dari elemen pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Tergabungnya ketiga elemen aktor tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi *stakeholder* yakni sebagai pembuat kebijakan terdiri dari seluruh elemen pemerintah. Kemudian, koordinator terdiri dari Bappeda; Puskesmas serta posyandu sebagai fasilitator; DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kelompok Akademisi serta Pakar sebagai implementor; dan pihak swasta sebagai akselerator. Analisis peran yang dilakukan menghasilkan bahwa sebagai kelompok aktor pembuat kebijakan dan koordinator termasuk *players*, fasilitator dan implementor termasuk *subject*, swasta termasuk *contest setter* dan masyarakat termasuk *crowd*. Upaya penanganan *stunting* ini masih terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya kepercayaan antara anggota, proses KLA yang berbelit, tumpang tindih pelaksanaan tugas, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan data.

Kata Kunci : Klasifikasi, Peran, *Stakeholder*, *Stunting*, Kota Layak Anak (KLA)

ABSTRACT

Surakarta is one of those that has the title of Child-Friendly City (KLA). However, even though the City of Surakarta obtained the KLA title, some problems still exist, especially regarding children's basic health rights. This research analyzed the problem of stunting by using an analysis of the role of stakeholders and the obstacles occurring in overcoming stunting. This research was conducted using qualitative research methods. The research results showed that there was a collaborative relationship among stakeholders to cope with the problem of stunting as mandated by the KLA concept. This collaborative relationship could be seen in the formation of the Surakarta City Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), which consists of government, private sector, and community elements. The combination of these three actor elements was then classified into several stakeholder classifications, namely as policymakers consisting of all government elements. Then, the coordinator consists of the Regional Development Planning Agency (Bappeda); Community Health Centers (Puskesmas), and Integrated Healthcare Center (Posyandu) as facilitators; Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB), Health Service, Social Service, Academic Group and Experts as implementers; and the private sector as accelerators. The role analysis carried out showed that a group of policymakers and coordinators belonged to players, facilitators and implementers belonged to subjects, the private sector belonged to contest setters, and the community belonged to the crowd. Several obstacles, including lack of trust between stakeholder, complicated in KLA process, overlapping implementation of tasks, lack of coordination, and limited data hindered the efforts to deal with stunting.

Keywords : Classification, Roles, Stakeholders, Stunting, Child-Friendly Cities (KLA)